

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fitri Nurpita<sup>1</sup>, Mely Cahyani<sup>2</sup>, Thufeil Abyan Ahmad<sup>3</sup>, Muhammad Syaifuddin<sup>4</sup>

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>1234</sup>

e-mail Correspondent: [fitrinurpitaunsuskariau@gmail.com](mailto:fitrinurpitaunsuskariau@gmail.com)<sup>1</sup>, [melycahyanipasca@gmail.com](mailto:melycahyanipasca@gmail.com)<sup>2</sup>, [thufeilabs@gmail.com](mailto:thufeilabs@gmail.com)<sup>3</sup>, [muhammadsyaifudin74@gmail.com](mailto:muhammadsyaifudin74@gmail.com)<sup>4</sup>

### Info Artikel

### Abstract

#### Keywords:

*Policy, National Education, Policy Implementation, Education Quality.*

*Education plays a strategic role in national development because it improves the quality of human resources. To achieve national education goals, the government establishes various policies that serve as guidelines for the implementation of education in Indonesia. However, the success of an education policy is determined not only by its formulation but also by the effectiveness of its implementation in practice. This study aims to examine the foundations of national education policy, its implementation, supporting factors, and obstacles encountered in its implementation. This study used a qualitative approach using library research. Data were obtained through a review of various literature sources, including books, scientific journal articles, previous research results, and relevant regulatory documents. The results indicate that national education policy has a strong legal, philosophical, sociological, pedagogical, and psychological foundation. Its implementation is realized through curriculum development, improving teacher quality, implementing National Education Standards, equalizing access to education, evaluating education, digitizing education, and strengthening character education. Successful implementation is supported by the role of the government, teacher professionalism, principal leadership, the availability of infrastructure, school management, community participation, and the use of technology. Obstacles still faced include disparities in educational facilities, limited human resources, funding issues, socioeconomic factors of students, and the digital divide. Therefore, synergy between all stakeholders is needed to achieve effective, equitable, and sustainable implementation of education policies.*

#### Abstrak

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa karena berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan kebijakan pendidikan nasional, bentuk implementasinya, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui kajian berbagai sumber literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen peraturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional memiliki landasan yuridis, filosofis, sosiologis, pedagogis, dan psikologis yang kuat. Implementasinya diwujudkan melalui pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru, penerapan Standar Nasional Pendidikan, pemerataan akses pendidikan, evaluasi pendidikan, digitalisasi pendidikan, dan penguatan pendidikan karakter. Keberhasilan implementasi didukung oleh peran pemerintah, profesionalisme guru, kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana prasarana, manajemen sekolah, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Adapun hambatan yang masih

#### Kata kunci:

Kebijakan, Pendidikan Nasional, Implementasi Kebijakan, Mutu Pendidikan.

dihadapi meliputi ketimpangan fasilitas pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan pendanaan, faktor sosial ekonomi peserta didik, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pendidikan yang efektif, merata, dan berkelanjutan.

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional karena berperan langsung dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan sistem pendidikannya dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, beriman, serta mampu menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi (Mulyana, 2026). Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai sosial, dan pembinaan kesadaran spiritual (Putri *et al*, 2025).

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan kebijakan pendidikan nasional sebagai pedoman dalam mengatur arah dan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional menjadi instrumen penting yang menghubungkan tujuan pendidikan dengan pelaksanaan pendidikan secara nyata di lapangan. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah dapat menentukan standar, strategi, serta program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional, memperluas akses pendidikan, serta menjamin pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara (Anisah, 2025).

Seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan pendidikan nasional terus mengalami penyesuaian untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta perubahan kebutuhan masyarakat. Berbagai kebijakan seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pendidikan, dan penguatan pendidikan karakter merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkualitas. Namun, implementasi berbagai kebijakan tersebut sering kali menghadapi dinamika yang berbeda di setiap daerah karena adanya perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan (Putri *et al*, 2025).

Namun demikian, keberhasilan kebijakan pendidikan nasional tidak cukup hanya dirumuskan dalam bentuk regulasi atau program, melainkan sangat ditentukan oleh implementasinya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan nasional tidak selalu berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh perbedaan kondisi pendidikan di setiap daerah. Ketimpangan fasilitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kesenjangan akses teknologi masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kesiapan berbagai pihak dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan nasional dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendalanya. Dengan demikian, pembahasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan nasional menjadi penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai landasan kebijakan, bentuk implementasi, faktor pendukung, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional yang lebih efektif, berkualitas, dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan, implementasi, faktor pendukung, serta hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Landasannya**

Kebijakan pendidikan nasional merupakan instrumen strategis negara dalam mengatur arah, tujuan, serta penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Secara umum, kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan, aturan, serta program yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengelola sistem pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan nasional (Mahardhani, 2025).

Dalam konteks pembangunan bangsa, kebijakan pendidikan nasional menjadi elemen utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan pendidikan nasional di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, karakter, dan peradaban bangsa guna menciptakan individu yang cerdas, beriman, dan bertanggung jawab yang mampu menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi (Indahsari & Sumarsono, 2025). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman. Perubahan kurikulum, peningkatan kualitas guru, pembaruan sistem evaluasi, serta program pemerataan akses pendidikan merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, kebijakan pendidikan nasional mencakup beberapa aspek utama. Pertama, kebijakan yang berkaitan dengan standar pendidikan, seperti standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, serta standar penilaian. Kedua, kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum sebagai pedoman pembelajaran dan capaian kompetensi peserta didik. Ketiga, kebijakan terkait pendanaan dan pemerataan pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Keempat, kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui program sertifikasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta pelatihan berkelanjutan. Kelima, kebijakan terkait evaluasi dan pengawasan pendidikan, seperti asesmen nasional dan akreditasi lembaga pendidikan (Hartono & Lubis, 2024). Semua aspek tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional bersifat luas dan kompleks, sehingga harus dipahami sebagai sistem yang saling terhubung.

#### **1. Landasan Yuridis Kebijakan Pendidikan Nasional**

- a. Kebijakan pendidikan nasional bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan dasar tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban yang harus difasilitasi oleh negara. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Kemudian Pasal 31 ayat (4) menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD (Jumyati *et al*, 2022). Ketentuan ini menjadi bukti bahwa pendidikan merupakan sektor utama pembangunan nasional yang harus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
  - b. Kebijakan pendidikan nasional diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan karena mengatur pendidikan secara menyeluruh, termasuk tujuan pendidikan nasional, jalur dan jenjang pendidikan, hak dan kewajiban peserta didik, peran pendidik, serta sistem evaluasi Pendidikan. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. UU Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pendidikan harus dilaksanakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan pesertanya sepanjang hayat.
2. Landasan Filosofis Kebijakan Pendidikan Nasional

Landasan filosofis kebijakan pendidikan nasional bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Pancasila menjadi pedoman nilai dalam menentukan arah pendidikan Indonesia. Pendidikan nasional tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, berkepribadian, serta memiliki kepedulian sosial (Yunitasari & Hafiz, 2020). Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan nasional harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa pendidikan harus membentuk peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengarahkan pendidikan agar menghargai martabat manusia, menanamkan sikap toleransi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nilai Persatuan Indonesia menuntut pendidikan agar memperkuat nasionalisme, semangat kebangsaan, dan kesadaran hidup dalam keberagaman. Nilai Kerakyatan menekankan bahwa pendidikan harus dikelola secara demokratis dengan partisipasi masyarakat. Sedangkan nilai Keadilan Sosial menjadi dasar agar pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Yunitasari & Hafiz, 2020).

Dengan demikian, landasan filosofis menunjukkan bahwa pendidikan nasional memiliki misi besar dalam membangun peradaban bangsa yang bermoral dan berkeadilan. Kebijakan pendidikan harus tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa.

3. Landasan Sosiologis Kebijakan Pendidikan Nasional

Landasan sosiologis kebijakan pendidikan nasional didasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan dipengaruhi oleh perubahan sosial. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, bahasa, kondisi geografis, serta

tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda membutuhkan kebijakan pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial tersebut (Itasaiyah *et al*, 2025). Kebijakan pendidikan nasional tidak dapat diterapkan secara kaku, melainkan harus fleksibel agar dapat menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan, termasuk daerah terluar dan tertinggal.

Perubahan sosial akibat globalisasi juga menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi, perkembangan industri, serta tuntutan kompetensi abad 21 menyebabkan kebijakan pendidikan nasional harus terus diperbarui. Pendidikan dituntut untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi yang baik, serta literasi digital (Destiana *et al*, 2025). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, seperti digitalisasi sekolah, penguatan pembelajaran berbasis proyek, serta inovasi metode pembelajaran.

#### 4. Landasan Pedagogis Kebijakan Pendidikan Nasional

Landasan pedagogis kebijakan pendidikan nasional berkaitan dengan prinsip pendidikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga harus membentuk sikap dan keterampilan peserta didik secara seimbang. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan manusia seutuhnya, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Landasan pedagogis menuntut agar proses pembelajaran dilakukan secara aktif dan bermakna. Peserta didik harus diberi ruang untuk berpikir, bertanya, menalar, serta mengembangkan kreativitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kebijakan pendidikan modern juga mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered learning*), sehingga guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu menemukan dan mengembangkan potensi dirinya (Nurfauzana *et al*, 2025).

Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan nasional juga harus memberikan perhatian besar pada kualitas tenaga pendidik. Guru menjadi ujung tombak keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan, serta pengembangan profesional berkelanjutan. Dengan penguatan aspek pedagogis tersebut, diharapkan kebijakan pendidikan nasional mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta berdaya saing.

#### 5. Landasan Psikologis Kebijakan Pendidikan Nasional

Landasan psikologis kebijakan pendidikan nasional berkaitan dengan perkembangan mental, emosi, dan kepribadian peserta didik. Pendidikan harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak sesuai usia, kemampuan belajar, motivasi, serta kebutuhan emosional peserta didik (Yuliati & Atikah, 2025). Kebijakan pendidikan yang tidak memperhatikan aspek psikologis berpotensi menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan tekanan belajar yang berlebihan.

Dalam pelaksanaan pendidikan, peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek yang dipaksa memenuhi target akademik semata, melainkan sebagai individu yang memiliki karakter dan kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan nasional seharusnya mendukung lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendorong pertumbuhan mental yang sehat. Kebijakan seperti penguatan pendidikan

karakter, layanan bimbingan konseling, serta perubahan sistem evaluasi agar tidak hanya menilai hafalan, merupakan bentuk penerapan pendekatan psikologis dalam pendidikan nasional. Dengan adanya landasan psikologis ini, pendidikan nasional diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, memiliki kepercayaan diri, dan mampu beradaptasi dalam kehidupan sosial.

## **B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional**

Implementasi kebijakan pendidikan nasional merupakan tahap penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah diterapkan secara nyata di lapangan. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan berbagai regulasi, program, dan keputusan pendidikan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai (Noviyanti *et al*, 2025).

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional sangat menentukan kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang baik sekalipun akan menjadi tidak bermakna apabila pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan pendidikan nasional menuntut adanya sinergi antara berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta dukungan Masyarakat (Noviyanti *et al*, 2025). Implementasi kebijakan pendidikan pada dasarnya adalah proses yang kompleks karena harus menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi sosial, budaya, geografis, dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda.

### **1. Implementasi Kebijakan Kurikulum Nasional**

Salah satu bentuk utama implementasi kebijakan pendidikan nasional terlihat pada penerapan kurikulum di satuan pendidikan. Kurikulum menjadi pedoman utama dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, metode pembelajaran, serta standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik (Zainun & Arifin, 2024). Dalam sejarah pendidikan Indonesia, perubahan kurikulum sering terjadi sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Perubahan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan selalu bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Implementasi kurikulum di sekolah bukan hanya sekadar mengganti buku atau silabus, melainkan mencakup perubahan cara pandang terhadap pembelajaran. Dalam kebijakan Kurikulum Merdeka misalnya, sekolah diarahkan untuk menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran, mengembangkan modul ajar, serta menyesuaikan metode dengan karakter peserta didik. Implementasi kurikulum ini juga mendorong adanya pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah.

### **2. Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan**

Implementasi kebijakan pendidikan nasional juga terlihat pada program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Guru merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan, karena kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah berupaya meningkatkan kualitas guru, seperti program sertifikasi guru, Pendidikan Profesi

Guru (PPG), pelatihan dan workshop berkelanjutan, serta program guru penggerak (Amrizal *et al*, 2023).

Program sertifikasi guru bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi profesional sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi juga menjadi bentuk penghargaan negara terhadap profesi guru melalui pemberian tunjangan profesi. Selain itu, PPG menjadi jalur utama untuk membentuk guru profesional yang tidak hanya memahami teori pendidikan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Melalui program ini, diharapkan kualitas guru dapat meningkat sehingga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional (Asyarah *et al*, 2024).

### 3. Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan salah satu kebijakan penting yang menjadi pedoman bagi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. SNP meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Implementasi SNP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sekolah di Indonesia memiliki kualitas layanan pendidikan yang minimal sama dan dapat dipertanggungjawabkan (Herlina, 2023).

Dalam implementasinya, SNP menjadi acuan bagi sekolah untuk memperbaiki sistem pengelolaan pendidikan. Sekolah harus memenuhi standar proses pembelajaran yang baik, menyediakan fasilitas yang layak, serta melaksanakan evaluasi pembelajaran yang objektif. Pemerintah juga menggunakan SNP sebagai dasar akreditasi sekolah. Akreditasi ini menjadi alat penilaian mutu lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

### 4. Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dan Pemerataan Akses

Implementasi kebijakan pendidikan nasional juga berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan pemerataan akses. Pemerintah melalui kebijakan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD telah menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan sektor Pendidikan (Sunarsih, 2022). Salah satu bentuk implementasi nyata dari kebijakan pembiayaan adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan membantu sekolah dalam membiayai kebutuhan operasional, sehingga peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih terjangkau. Selain BOS, pemerintah juga melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan. Program ini bertujuan mengurangi angka putus sekolah serta memastikan bahwa semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

### 5. Implementasi Kebijakan Evaluasi Pendidikan

Evaluasi pendidikan merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional, karena berfungsi untuk mengukur pencapaian mutu pendidikan serta keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu bentuk implementasi evaluasi pendidikan adalah pelaksanaan Asesmen Nasional yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kebijakan ini bertujuan untuk menilai kualitas pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan nilai akademik peserta didik, tetapi juga berdasarkan karakter serta kondisi lingkungan belajar di sekolah (Zuanda *et al*, 2024).

Dalam implementasinya, Asesmen Nasional menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk memetakan mutu pendidikan di setiap daerah. Hasil asesmen digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sekolah, sehingga dapat dijadikan dasar perbaikan kebijakan pendidikan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui sistem akreditasi sekolah yang menilai kelayakan lembaga pendidikan dari berbagai aspek standar nasional pendidikan.

#### 6. Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pendidikan

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Digitalisasi pendidikan bertujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi, memperluas akses sumber belajar, serta mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Implementasi kebijakan ini dapat dilihat melalui pengembangan platform pembelajaran digital, penggunaan perangkat teknologi di sekolah, serta peningkatan literasi digital bagi guru dan peserta didik (Anisah *et al*, 2025).

Digitalisasi pendidikan menjadi semakin penting setelah pandemi Covid-19 yang mendorong sistem pembelajaran jarak jauh. Banyak sekolah mulai menggunakan aplikasi pembelajaran daring dan sumber belajar digital sebagai alternatif proses belajar. Pemerintah juga mengembangkan berbagai program untuk mendukung pembelajaran digital, seperti penyediaan modul digital, pelatihan guru berbasis teknologi, serta bantuan perangkat teknologi di sekolah.

#### 7. Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter

Selain fokus pada aspek akademik, kebijakan pendidikan nasional juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki nilai moral, etika, disiplin, tanggung jawab, serta sikap sosial yang baik (Indahsari & Sumarsono, 2025). Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, budaya sekolah, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Program penguatan pendidikan karakter di sekolah menjadi bagian penting dari kebijakan nasional untuk menghadapi berbagai masalah sosial seperti kenakalan remaja, perundungan, penyalahgunaan teknologi, serta krisis moral di kalangan generasi muda. Sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga menjadi lingkungan pembinaan akhlak dan pembentukan kepribadian.

### C. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional

Keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor pendukung yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang melibatkan banyak pihak dan dipengaruhi oleh kondisi struktural, sumber daya, kepemimpinan, serta partisipasi masyarakat. Tanpa adanya faktor pendukung yang memadai, kebijakan pendidikan yang telah dirancang dengan baik akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor pendukung ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu dukungan pemerintah, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, sistem manajemen sekolah, serta partisipasi masyarakat.

#### 1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dukungan pemerintah merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan regulasi,

standar pendidikan, serta kebijakan anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan terlihat dari alokasi anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor Pendidikan (Mahardhani, 2025). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), pembangunan infrastruktur sekolah, serta peningkatan kualitas guru.

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan sekolah negeri, distribusi guru, pengawasan pelaksanaan kurikulum, serta penyediaan fasilitas pendidikan. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Jika terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, maka kebijakan tersebut berpotensi tidak berjalan optimal.

## 2. Kualitas dan Profesionalisme Guru

Guru merupakan ujung tombak dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional. Sehebat apa pun kebijakan yang dirancang, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menerapkannya di kelas. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Profesionalisme guru mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Noviyanti *et al*, 2025). Guru yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mudah memahami dan mengadaptasi kebijakan baru, seperti perubahan kurikulum atau sistem evaluasi. Sebaliknya, jika guru kurang memahami kebijakan yang diterapkan, maka implementasi kebijakan akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta pengembangan kompetensi menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan nasional.

## 3. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pendidikan nasional berjalan dengan baik di tingkat satuan pendidikan. Kepemimpinan yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong inovasi pembelajaran, serta membangun kerja sama antar guru dan tenaga kependidikan (Noviyanti *et al*, 2025). Kepala sekolah berfungsi sebagai manajer pendidikan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah sesuai dengan kebijakan nasional. Kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan akan mempercepat adaptasi sekolah terhadap kebijakan baru. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah dapat menyebabkan kebijakan hanya dijalankan secara administratif tanpa membawa perubahan nyata dalam kualitas pembelajaran.

## 4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional. Fasilitas seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, perangkat teknologi, serta akses internet sangat memengaruhi kualitas pembelajaran (Noviyanti *et al*, 2025). Implementasi kebijakan kurikulum modern, pembelajaran berbasis proyek, serta digitalisasi pendidikan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap cenderung lebih mudah menerapkan kebijakan inovatif dibandingkan sekolah yang masih kekurangan sarana dasar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi

faktor pendukung yang krusial dalam memastikan kebijakan pendidikan nasional dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

#### 5. Sistem Manajemen dan Tata Kelola Sekolah

Manajemen sekolah yang baik juga menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional. Tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif akan mempermudah pelaksanaan berbagai program pendidikan. Perencanaan program sekolah yang selaras dengan kebijakan nasional, pengelolaan anggaran yang tepat, serta sistem evaluasi internal yang berkelanjutan akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Sekolah yang memiliki budaya organisasi yang kuat dan kolaboratif akan lebih siap dalam menerima perubahan kebijakan. Komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah akan memperlancar proses pelaksanaan program pendidikan (Noviyanti *et al*, 2025).

#### 6. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan keluarga. Partisipasi orang tua dalam mendukung proses pembelajaran, memberikan motivasi kepada anak, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. Selain itu, peran komite sekolah dan masyarakat dalam mengawasi serta mendukung program pendidikan juga menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan. Kerja sama antara sekolah dan masyarakat akan memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam pendidikan karakter dan pembinaan moral peserta didik (Noviyanti *et al*, 2025).

#### 7. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pendidikan

Perkembangan teknologi memberikan peluang besar dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperluas akses sumber belajar, serta mempermudah sistem administrasi pendidikan (Noviyanti *et al*, 2025). Sekolah yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal akan lebih adaptif terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan. Inovasi dalam metode pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan penggunaan media digital, juga menjadi faktor pendukung penting. Guru yang kreatif dan inovatif akan lebih mudah mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan karakter peserta didik.

### **D. Hambatan dan Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional**

Implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Walaupun pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Hambatan tersebut dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, mulai dari keterbatasan sumber daya, ketimpangan antar wilayah, hingga persoalan manajemen pendidikan. Oleh karena itu, pembahasan tentang tantangan implementasi kebijakan pendidikan nasional menjadi penting untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan dapat diwujudkan dalam realitas pendidikan di Indonesia. Hambatan dan tantangan implementasi kebijakan pendidikan nasional dapat dilihat dalam beberapa aspek utama, yaitu pemerataan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, sistem birokrasi, pendanaan, serta kesiapan sekolah menghadapi perubahan kebijakan.

#### 1. Ketimpangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Antar Wilayah

Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional adalah ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan daerah tertinggal (Darmansah *et al*, 2025). Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, ruang multimedia, dan akses internet yang stabil. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil masih banyak yang mengalami kekurangan ruang kelas layak, alat pembelajaran, bahkan akses listrik dan jaringan internet.

Ketimpangan fasilitas ini menyebabkan kebijakan pendidikan nasional tidak dapat diterapkan secara merata. Misalnya, kebijakan digitalisasi pendidikan atau penerapan pembelajaran berbasis teknologi akan sulit dijalankan di sekolah yang tidak memiliki perangkat komputer atau jaringan internet yang memadai. Hal ini berdampak pada ketidakadilan pendidikan, karena peserta didik di daerah terpencil tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti peserta didik di kota.

## 2. Rendahnya Pemahaman dan Kesiapan Pelaksana Kebijakan

Kebijakan pendidikan nasional sering kali mengalami kendala karena kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan di lapangan. Dalam banyak kasus, sekolah dan guru belum sepenuhnya memahami isi kebijakan, tujuan kebijakan, serta cara penerapannya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi, pelatihan yang tidak merata, atau informasi kebijakan yang belum tersampaikan dengan baik (Darmansah *et al*, 2025). Jika guru tidak mendapatkan pendampingan yang cukup, maka kebijakan tersebut sulit diimplementasikan dengan efektif. Akibatnya, sekolah menjalankan kebijakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban administrasi tanpa perubahan mendasar dalam proses pembelajaran.

## 3. Permasalahan Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran

Walaupun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, implementasi kebijakan pendidikan nasional masih menghadapi kendala dalam pengelolaan pendanaan. Masalah seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaktepatan sasaran bantuan pendidikan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sering terjadi di beberapa daerah. Program seperti BOS dan bantuan beasiswa sebenarnya sangat membantu sekolah dan peserta didik, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan administratif dan pengawasan. Jika dana pendidikan tidak dikelola secara tepat dan efisien, maka kebijakan pemerataan pendidikan akan sulit tercapai. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah tertentu juga menyebabkan pembangunan fasilitas pendidikan tidak berjalan maksimal (Anisah, 2025).

## 4. Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi Peserta Didik

Hambatan implementasi kebijakan pendidikan nasional juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat (Anisah, 2025). Banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, atau kebutuhan internet. Kondisi ini dapat menyebabkan rendahnya motivasi belajar, angka putus sekolah, serta rendahnya partisipasi pendidikan di beberapa daerah. Selain itu, faktor lingkungan sosial seperti kurangnya dukungan orang tua, rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, serta budaya masyarakat tertentu yang masih menganggap pendidikan tidak terlalu penting juga menjadi tantangan serius. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada dukungan keluarga dan masyarakat.

## 5. Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan

Digitalisasi pendidikan merupakan kebijakan penting di era modern, namun implementasinya menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan digital. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi seperti komputer, proyektor, atau jaringan internet yang memadai. Bahkan, sebagian peserta didik di daerah tertentu juga tidak memiliki perangkat seperti smartphone atau laptop untuk mendukung pembelajaran daring. Kesenjangan digital ini menyebabkan kebijakan pendidikan berbasis teknologi tidak dapat diterapkan secara merata (Anisah, 2025). Akibatnya, kualitas pembelajaran antar wilayah menjadi semakin timpang. Sekolah yang memiliki akses teknologi dapat mengembangkan pembelajaran digital dan inovatif, sedangkan sekolah yang tidak memiliki akses teknologi akan tertinggal.

## KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan nasional merupakan instrumen strategis yang berfungsi mengarahkan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan ini memiliki landasan yang kuat, baik secara yuridis, filosofis, sosiologis, pedagogis, maupun psikologis, sehingga menjadi dasar dalam pengembangan sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan perkembangan zaman.

Implementasi kebijakan pendidikan nasional diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan, seperti penerapan kurikulum nasional, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, pemerataan pembiayaan pendidikan, evaluasi pendidikan, digitalisasi pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter. Keberhasilan implementasinya didukung oleh berbagai faktor, antara lain dukungan pemerintah, profesionalisme guru, kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, manajemen sekolah yang baik, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi pendidikan.

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan nasional masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketimpangan sarana dan prasarana antarwilayah, rendahnya kesiapan pelaksana kebijakan, permasalahan pendanaan, faktor sosial ekonomi peserta didik, serta kesenjangan digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan pendidikan nasional dapat berjalan secara efektif, merata, dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

## REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Amrizal *et al.* 2023. "Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Melalui Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Batang Hari". *Jurnal Muntazam*. 4(2).
- Anisah, N. 2025. "Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional: Relevansi, Tantangan, Dan Implikasi Terhadap Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan". *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*. 1(3)
- Asyarah, W. N., Wulandari, F., Primasti, Y. D., Wijaya, H., & Warman. "Pengembangan Standar dan Kualitas Kompetensi Guru Profesional Melalui Program Sertifikasi di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8(1).
- Darmansah, T. *et al.* 2025. "Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam". *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*. 3(1).
- Destiana, E. M. *et al.* 2025. "Management Pendidikan Abad 21, Globalisasi, Teknologi". *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(4).

- Hantono dan Lubis, W. 2024. “Standar Proses Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Tingkat SMP Di Kota Medan”. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*. 4(2).
- Herlina, B. 2023. “Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Di Man 1 Pesisir Barat”. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Indahsari, T., dan Sumarsono, R. M. 2025. “Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Konteks Pembentukan Karakter dan Pembangunan Moral Bangsa”. *Proceedings Series of Educational Studies*.
- Itasaiyah *et al.* 2025. “Landasan dan Kebijakan Kurikulum di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 9(2).
- Jumyati *et al.* 2022. “Landasan Yuridis Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(6).
- Mahardhani, A. J. 2025. “Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Administrasi Publik Teori Dan Praktik”. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Mulyana, D. 2026. “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Ma'arif Kadungora-Garu”. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 3(7).
- Noviyanti, W. *et al.* 2025. “The Role of Bureaucracy in the Implementation of Education Policy”. *TOFEDU: The Future of Education Journal*. 4(5).
- Nurfauzan, M. F. *et al.* 2025. “Landasan Filosofis, Sosiologis, Psikologis, Pedagogis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan Kurikulum Bahasa Arab Di Indonesia”. *AL IBRAH: Journal of Arabic Language Education*. 8(2).
- Putri, R. A. *et al.* 2025. “Hakikat Pendidikan dalam Kehidupan Manusia”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 9(2).
- Putri, F. A., Sani, M. R., Azura, S. M., Gustiawati, L., & Suryani, M. 2025. “Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional dalam Menwujudkan Generasi Emas Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 9(2).
- Sunarsih, O. 2022. “Analisis Studi Kebijakan Terhadap Standar Pembiayaan (Telaah Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis BOS)”. *Kuttab: Journal of Islamic Education Management*. 1(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yuliati, I., dan Atikah, C. 2025. “Landasan Psikologi Pendidikan Dalam Pembelajaran”. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. 6(9).
- Yunitasari, D., dan Hafiz, A. 202. “Pendidikan Pancasila: Filosofis Dan Dasar Negara”. Lombok: Al-Fikru Global Institut.
- Zainun dan Arifin, M. 2024. “Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Dampaknya terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas”. *ITQAN: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan*. 15(2).
- Zuanda, S. *et al.* 2024. “Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8(2).